

## **ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**Sri Ayem<sup>1</sup> dan Selfisina Koanyanan<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa  
email: [sriayemfeust@gmail.com](mailto:sriayemfeust@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa  
email: [selvianokoanyanan@gmail.com](mailto:selvianokoanyanan@gmail.com)

### ***Abstract***

*This study aimed to analyze the effectiveness and contribution of local taxes, levies, and wealth management separated areas on local revenues (a case study in the Kulonprogo district 2010-2014). The approach in this study as well as the nature of the data used is quantitative. Population in this research is the Regional Revenue Realization Report Kulonprogo district and sample in this study is from the 2010-2014 Regional Revenue Realization reports Kulonprogo district data analysis methods used in this research is Descriptive Statistics, Analysis Effectiveness and Analysis of Contributions. Of three of these components can be concluded that the levels of the most effective revenue in 2013, and have contributed most to the local revenue is levies in 2010, although greatest contribution, but it can be said that the levies still less provide contributions to the local revenues Kulonprogo district.*

**Keywords:** *Analysis Of Effectiveness And Contribution Of Local Revenue (PAD)*

### **1. PENDAHULUAN**

Pemerintah Daerah, dituntut mewujudkan pembangunan daerah yang tidak bergantung pada pemerintah pusat. Untuk itu daerah diberi kewenangan untuk mengelola penerimaan daerah khususnya dari pendapatan asli daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. dalam undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, dalam pasal 1 disebutkan yang dimaksud dalam otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah Otonom ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat dalam sistem beberapa Daerah.

Adapun yang menjadi dasar hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Ahmad Yani (2009:51) adalah Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah . Peraturan Daerah kabupaten Kulon Progo No 6 tahun 2011 tentang pajak Daerah, bawah pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan di Daerah.

Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu dari lima kabupaten / kota di D.I. Yogyakarta, yang terletak paling barat, berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Potensi- potensi yang ada di Kabupaten Kulon Progo seharusnya bisa dimaksimalkan lagi untuk menambah sumber penerimaan yang diterima oleh daerah. Tujuan adanya peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah untuk mendorong perekonomian kabupaten kulon progo melalui pembangunan sarana prasarana yang menunjang perekonomian. Dengan adanya perekonomian tersebut diharapkan perekonomian dapat berkembang dan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Dalam peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 6 tahun 2011 menjelaskan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang.

**Tabel 4.1.**  
**Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan di Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2010-2014 (Rupiah)**

TAHUN	URAIAN	TARGET	REALISASI
2010	PAD	45.501.872.652,01	48,190,801,571.1
	PAJAK DAERAH	5.008.060.795,52	5.853.809.091,25
	RETRIBUSI DAERAH	7.590.100.720,00	7,727,507,308.00
	PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	4.785.876.909,61	4,740,517,850.30
2011	PAD	50.913.640.001,45	53,752,293,431.6
	PAJAK DAERAH	5.008.060.795,52	5.853.809.091,25
	RETRIBUSI DAERAH	9.133.349.000,00	8,450,599,293.00
	PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	4.936.479.031,53	4,936,479,032.53
2012	PAD	64.998.319.035,18	74,028,663,155.0
	PAJAK DAERAH	7.420.115.963,00	8.448.289.543,50
	RETRIBUSI DAERAH	12.021.510.570,00	11,655,374,999.0
	PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	6.770.687.918,62	6,765,040,924.72
2013	PAD	78.430.504.348,93	95,991,512,851.0
	PAJAK DAERAH	7.633.177.800,00	8.701.734.661,88
	RETRIBUSI DAERAH	13.773.670.148,00	14,986,509,628.7

Penerimaan PAD merupakan refleski dari 4 (empat) jenis pungutan yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan lain- lain yang sah. Penelitian ini untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2010 sampai dengan 2014. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa Laporan Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah kabupaten Kulon Progo dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Kabupaten Kulon Progo dan Target penerimaan PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Periode penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah tahun 2010 sampai dengan 2014.

Rosa Alamri meneliti tentang “Pengaruh pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap belanja daerah (studi kasus kabupaten/kota di propinsi gorontalo)”, hasil penelitian ini menunjukkan bawah secara persial pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten kota di propinsi gorontalo, retribusi daerah berpengaruh negatif tetapi tidak terhadap belanja daerah kabupaten kota di propinsi gorontalo, lain- lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap belanja daerah kabupaten kota di propinsi gorontalo, berdasarkan pengujian simultan ditemukan bawah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, berpengaruh simultan terhadap belanja daerah kabupaten kota di propinsi gorontalo.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo”.

## **2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **2.1. KAJIAN LITERATUR**

#### **2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Undang-undang No 32 tahun 2003 tentang pemerintah daerah, undang-undang No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, keputusan menteri dalam negeri no 29 tahun, 2002 tentang pedoman pengurusan dan pertanggung jawaban keuangan daerah serta tata cara pengawasan, penyusunan dan perhitungan APBD. PP No 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah, Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah, (Halim dan Nasir, 2006: 44) sedangkan menurut Saringgih (2003:122), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah dasar dari pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu, umumnya satu tahun.

#### **2.2. KERANGKA PENELITIAN**

Untuk menilai peningkatan PAD dapat melalui aspek pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan semakin tinggi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maka semakin tinggi PAD Kabupaten Kulon Progo, sebaliknya semakin rendah pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maka semakin rendah pula PAD. Penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan daerah yang dipisahkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang menjadi sumber penerimaan, dengan adanya sumber-sumber penerimaan ini harus mengukur efektivitas penerimaan. Dan dari hasil ini dapat mengetahui sejauh mana kontribusi pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## **3. METODE PENELITIAN**

### **3.1. Sifat Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kuantitatif yaitu melakukan pengukuran yang akurat mengenai efektivitas dan kontribusi pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Dalam penelitian ini peneliti hanya terbatas pada tingkat efektivitas, dan kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

### **3.2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Kulon Progo. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2016.

### **3.3. Definisi dan Operasional**

Penelitian ini digunakan untuk menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD Kabupaten Kulon Progo.

1. Pajak Daerah, Menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah, retribusi daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Data diambil dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2010 sampai 2014.
2. Retribusi Daerah, Menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk keperluan orang pribadi atau badan. Data diambil dari dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan aset Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2010-2014.
3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Undang-undang Nomor 17 pasal 2 tahun 2003 meliputi kekayaan negara / daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan daerah, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan atau kepentingan umum.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai daerah otonom dan dipungut berdasarkan peraturan daerah. meliputi : hasil pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Prameka (2012).

### **3.4. Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu. populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo.

### **3.5. Sampel dan Metode Pengumpulan Sampel**

adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, atau sub kelompok atau sebagian dari populasi. Berdasarkan karakteristiknya yang dipakai sebagai sampel adalah tahun 2010-2014 dari Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo. Dengan demikian maka pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus yaitu dengan mengambil populasi dari seluruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Kulon Progo.

### **3.6. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo dan data yang bersumber dari realisasi Anggaran Pendapatan Daerah, publikasi dari pemerintah daerah, peraturan perundang-undangan dan penelitian terdahulu. Data bersifat time series (runtut waktu) mulai dari januari sampai bulan desember meliputi data pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah kabupaten kulon progo. Mulai dari periode 2010-2014.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi dengan mempelajari dokumen-dokumen atau data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan data-data yang relevan. sumber dan penggunaanya dengan data Laporan Realisasi PAD Kabupaten Kulon Progo. Sifat data adalah kuantitatif yaitu berupa angka-angka dan bersifat obyektif.

### **3.7. Teknik Analisis Data**

#### **3.7.1. Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif adalah bagian dari ilmu statistik yang hanya mengolah, adalah merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sample. Analisa deskriptif ini dilakukan dengan pengujian hipotesis deskriptif. Hasil hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima, berarti hasil penelitian dapat digeneralisasikan. analisisnya adalah apakah hipotesis penelitian dapat digeneralisasikan atau tidak.

#### **1. Analisis Perhitungan Efektivitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.**

Untuk menghitung efektivitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan rumus sebagai berikut: menyajikan data tanpa mengambil keputusan untuk populasi. Dengan kata lain hanya melihat gambaran secara umum dari data yang didapatkan.

#### **2. Perhitungan Kontribusi PAD Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.**

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perhatikan Realisasi PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan kabupaten kulon progo tampak pada Tabel 4.1 berikut.

**Tabel 4.1.**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2010-2014 (Rupiah)**

TAHUN	URAIAN	TARGET	REALISASI
2010	PAD	45.501.872.652,01	48,190,801,571.16
	PAJAK DAERAH	5.008.060.795,52	5.853.809.091,25
	RETRIBUSI DAERAH	7.590.100.720,00	7,727,507,308.00
	KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	4.785.876.909,61	4,740,517,850.30
2011	PAD	50.913.640.001,45	53,752,293,431.63
	PAJAK DAERAH	5.008.060.795,52	5.853.809.091,25
	RETRIBUSI DAERAH	9.133.349.000,00	8,450,599,293.00
	PENGELOLAAN	4.936.479.031,53	4,936,479,032.53
2012	PAD	64.998.319.035,18	74,028,663,155.07
	PAJAK DAERAH	7.420.115.963,00	8.448.289.543,50
	RETRIBUSI DAERAH	12.021.510.570,00	11,655,374,999.00
	KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	6.770.687.918,62	6,765,040,924.72
2013	PAD	78.430.504.348,93	95,991,512,851.06
	PAJAK DAERAH	7.633.177.800,00	8.701.734.661,88
	RETRIBUSI DAERAH	13.773.670.148,00	14,986,509,628.75
	KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	8.267.601.424,42	8,252,584,228.16
2014	PAD	131.892.992.136,75	158,800,563,703.19
	PAJAK DAERAH	20.447.388.961,00	21.174.628.265.00
	RETRIBUSI DAERAH	6.776.772.693,00	6,777,314,436.00

**4.1. Statistik Deskriptif**

Statistik Deskriptif bertujuan untuk mengembangkan atau menggambarkan profil data penelitian dan mengidentifikasi variabel-variabel. Statistik deskriptif yang digunakan antara lain rata-rata (mean), maksimum, minimum, dan standar deviasi. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (yakobus Doru 2014).

**Tabel 4.2**  
**Hasil pengujian Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics <sup>a</sup>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	5	48.19	158.80	86.1522	44.75601
PAJAK_DAERAH	5	4.31	21.17	9.6956	6.67103
RETRIBUSI_DAERAH	5	6.78	14.99	9.9190	3.37354
PENG_KEKAYAAN_DAERAH_YANG_DIPISAHKAN	5	4.74	10.18	6.9738	2.29532
Valid N (listwise)	5				

Berdasarkan tabel 4.2 tersebut dapat diketahui nilai rata-rata jumlah pajak daerah Kabupaten Kulon Progo sebesar 9.6956 dengan jumlah pajak daerah terendah 4.31 dan tertinggi sebesar 21.17 dengan standar deviasi sebesar 6.6708 lebih kecil dari rata-rata sebesar 9.6956, menunjukkan bahwa distribusi data normal. Hal ini disebabkan oleh terjadinya perkembangan kegiatan perekonomian daerah serta pemanfaatan potensi pajak daerah yang semakin meningkat sebagai konsekuensi penerapan otonomi daerah yang memang mulai diberlakukan pada tahun tersebut sehingga daerah dituntut untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Berdasarkan tabel 4.2

tersebut, maka dapat diketahui rata-rata jumlah retribusi daerah kabupaten Kulon Progo sebesar 9.9190 dengan jumlah retribusi daerah terendah sebesar 6.78 dan tertinggi sebesar 14.99 dengan standar deviasi sebesar 3.37354 lebih kecil dari rata-rata sebesar 9.9190, menunjukkan bahwa distribusi data Normal. Setiap tahunnya mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2014 mengalami penurunan yang besar, akan tetapi peran retribusi terhadap jumlah PAD sangat penting.

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah perusahaan yang ada di kabupaten Kulon progo. Berdasarkan tabel 4.2 tersebut maka dapat diketahui rata-rata pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di kabupaten Kulon progo sebesar 6.9738 dengan jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terendah sebesar 4.74 dan tertinggi sebesar 10.18 dengan standart deviasi sebesar 2.29532 lebih kecil dari rata-rata sebesar 6.9738, menunjukkan bawah distribusi data Normal.

#### 4.2. Perhitungan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

##### 4.2.1. Perhitungan Efektivitas PAD

Efektivitas didapat dari Realisasi Penerimaan PAD dibagi Target Penerimaan PAD dikali 100% , hasil bagi di tahun 2010 sama dengan 105.90%, bahwa sangat efektif artinya sesuai dengan klasifikasi kriteria nilai Efektivitas yang ditetapkan oleh Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006. Apabila Realisasi Penerimaan PAD dibagi Target Penerimaan PAD lebih besar diatas 100% maka kriteria Nilai Efektivitas menunjukkan tingkat efektivitas sangat. Perhatikan Perhitungan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2010 sampai dengan 2014, nampak pada Tabel 4.3 berikut Efektif,

**Tabel 4.3**

**Perhitungan Efektivitas PAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2010 s/d 2014**

TAHUN	PAD (Rupiah)		LEBIH / KURANG		EFEKTIVITAS (%)	KET.
	TARGET	REALISASI	(Rupiah)	PRESENTASE (%)		
2010	45.501.872.652,01	48.190.801.571,16	2.778.768.023,15	6,11%	105,90%	sangat efektif
2011	50.913.640.001,45	53,752,293,431,63	2.838.653.430,18	5,58%	105,57%	sangat efektif
2012	64.998.319.035,18	74,028,663,155,07	9.030.344.199,89	13,89%	113,89%	sangat efektif
2013	78.430.504.348,93	95,991,512,851,06	17.561.008.502,13	22,39%	122,39%	sangat efektif
2014	131.892.992.136,75	158,800,563,703,19	26.925.439.716,44	20,41%	120,40%	sangat efektif

*Sumber data : DPPKA kabupaten Kulon Progo (data diolah) diambil tahun 2015*

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa lima tahun berturut-turut tingkat Realisasi PAD mencapai Target yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa pada tahun 2010 target penerimaan PAD sebesar 45.501.872.652,01, realisasi penerimaan mencapai 48.190.801.571,16. Ini berarti bahwa mengalami kelebihan sebesar 2.778.768.023,15. Presentasinya sebesar 6,11%, dan tingkat efektivitas sebesar 105,90% Pada tahun 2011, target penerimaan PAD sebesar 50.913.640.001,45, realisasi penerimaan sebesar 53,752,293,431,63 kelebihan sebesar 2.838.653.430,18, presentase sebesar 5,58%, tingkat efektivitas sebesar 105,57%, sedangkan pada tahun 2012 target penerimaan sebesar 64.998.319.035,18 realisasinya sebesar 74,028,663,155,07 ini juga berarti bawah mengalami kelebihan yang sangat meningkat mencapai 9.030.344.119,89, presentase sebesar 13,89%. tingkat efektivitas sebesar 113,89%. Di tahun 2013 target sebesar 78.430.504.348,93 realisasinya sebesar 95,991,512,851,06 mengalami hal yang sama juga kelebihan mencapai 17.561.008.502,13, presentase sebesar 22,39% efektivitas sebesar 122,39% dan di tahun yang ke lima tahun 2014 target realisasi sebesar 158,800,563,703,19 mengalami kelebihan sebesar 26.925.439.716,44. Presentasi sebesar 20,41%. tingkat efektivitas sebesar 120,40% Ini menunjukkan bahwa realisasi PAD melebihi target, dan mencapai efektivitas. Maka rata-rata efektivitas mulai tahun 2010 sampai dengan 2014 sangat Efektif.

#### 4.2.2. Perhitungan Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas didapat dari Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dibagi Target Penerimaan Pajak Daerah dikali 100% , hasil bagi di tahun 2010 sama dengan 107.22%, bahwa sangat efektif artinya sesuai dengan klasifikasi kriteria nilai Efektivitas yang ditetapkan oleh Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006. Apabila Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dibagi Target Penerimaan Pajak Daerah lebih besar diatas 100% maka kriteria Nilai Efektivitas menunjukkan tingkat efektivitas sangat Efektif, Perhatikan Perhitungan Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2010.

**Tabel 4.4**  
**Perhitungan Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2010 s/d 2014.**

TAHUN	Pajak Daerah (Rupiah)		LEBIH / KURANG		EFEKTIVITAS (%)	keterangan
	TARGET	REALISASI	(Rupiah)	PRESENTASE (%)		
2010	4.019.852.393,50	4.310.294.480,42	290.442.087.12	7.23%	107.22 %	sangat efektif
2011	5.008.060.795,52	5.853.809.091,25	845.748.295.73	16.89%	116.88 %	sangat efektif
2012	7.420.115.963,00	8.448.289.543,50	1.028.173.580.50	13.86%	113.85 %	sangat efektif
2013	7.633.177.800,00	8.701.734.661,88	1.068.556.861.88	14.00%	113.99 %	sangat efektif
2014	20.447.388.961,00	21.174.628.265,00	727.239.303.34	3.56%	103.55 %	sangat efektif

Sumber data : DPPKA kabupaten Kulon Progo (data diolah) diambil tahun 2015.

Dari tabel 4.4. pada tahun 2010 target pajak daerah sebesar 4.019.852.393,50, realisasi pajak daerah 4.310.294.480,42 mengalami kelebihan sebesar 290.442.087.2. presentasinya sebesar 7.23% dan tingkat efektivitas sebesar 107.22%, di tahun 2011 target penerimaan sebesar 5.008.060.795,52, realisasi penerimaan pajak daerah sebesar 5.853.809.091,25, mengalami kelebihan sebesar 845.748.295,73. presentasinya sebesar 16.89% dan tingkat efektivitas sebesar 116.88%, Pada tahun 2012 target penerimaan sebesar 7.420.115.963,00. realisasi penerimaan pajak daerah sebesar 8.448.289.543,50 ini berarti mengalami kelebihan sebesar 1.028.173.580.50. presentasinya sebesar 13.86% dan tingkat efektivitas sebesar 113.85%, sementara itu di tahun 2013 target penerimaan sebesar 7.633.177.800,00 realisasi di tahun 2013 sebesar 8.701.734.661,88 kelebihan mencapai 1.068.556.861.88, presentasinya sebesar 14.00% dan tingkat efektivitas sebesar 113.99%, dan di tahun 2014 target penerimaan pajak daerah sebesar 20.447.388.961,00 mengalami realisasi penerimaan sebesar 21.174.628.265,00 mengalami kelebihan sebesar 727.239.303.34. presentasinya sebesar 3.56% dan tingkat efektivitas sebesar 103.55%, ini berarti pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah mencapai target bahkan melebihi target penerimaan pajak daerah.

#### 4.2.3. Perhitungan Efektivitas Retribusi Daerah

Efektivitas didapat dari Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah dibagi Target Penerimaan Retribusi Daerah dikali 100% , hasil bagi di tahun 2010 sama dengan 101.80%, bahwa sangat efektif artinya sesuai dengan klasifikasi kriteria nilai Efektivitas yang ditetapkan oleh Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006. Apabila Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah dibagi Target Penerimaan Retribusi Daerah lebih besar diatas 100% maka kriteria Nilai Efektivitas menunjukkan tingkat efektivitas sangat Efektif, dan bila hasil presentase efektivitas menunjukkan 100% maka efektif. Perhatikan Perhitungan Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2010 sampai dengan 2014, nampak pada Tabel 4.5 berikut :

**Tabel 4.5**  
**Perhitungan Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2010 s/d 2014**

TAHUN	Retribusi Daerah (Rupiah)		LEBIH / KURANG		EFEKTIVITAS (%)	keterangan
	TARGET	REALISASI	(Rupiah)	PRESENTASE (%)		
2010	7.590.100.720,00	7.727.507.308,00	137.406.588,00	1.81%	101.80%	sangat efektif
2011	9.133.349.000,00	8.450.599.293,00	(687.749.707,00)	-7.48%	92.52	efektif
2012	12.021.510.570,00	11.655.374.999,00	(366.135.571,00)	-3.05%	96.95	efektif
2013	13.773.670.148,00	14.986.509.628,75	1.212.839.480,75	8.81%	108.80%	sangat efektif
2014	6.776.772.693,00	6.777.314.436,00	541.743,00	0.01%	100.00%	sangat efektif

Sumber data : DPPKA kabupaten Kulon Progo (data diolah) diambil tahun 2015.

Hasil analisis tersebut di tabel 4.5 menunjukkan bahwa pada tahun 2010 target pemerintah daerah kabupaten kulon progo 7.590.100.720,00 sebesar sedangkan realisasinya sebesar 7,727,507,308.00 ini menunjukkan bahwa mengalami kelebihan sebesar 137.406.588.00, persentasenya sebesar 1.81% presentase efektivitas menunjukkan 101.81%, tahun 2011 targetnya sebesar 9.133.349.000,00 realisasi penerimaan retribusi daerah sebesar 8,450,599,293.00 ini menunjukkan bahwa target lebih besar dibandingkan dengan realisasi mengalami kekurangan sebesar 682.749.707,00, persentasenya sebesar 1.81% namun cukup efektif, besarnya tingkat efektivitas sebesar 92,52% sama di tahun 2012 Target yang diinginkan sebesar 12.021.510.570,00 realisasi yang terjadi sebesar 11,655,374,999.00 ini mengalami kekurangan sebesar 366.135.571,00, hasilnya juga efektif, sebesar 96.95% namun pada tahun 2013 target sebesar 13.773.670.148,00 dan realisasi penerimaan retribusi daerah sebesar 14,986,509,628.75 maka hal ini menunjukkan bahwa pada retribusi daerah mengalami kelebihan sebesar 1.212.839.480,75, persentasenya sebesar 8.81% presentase efektivitas menunjukkan 108.81%, dan sama halnya di tahun 2014 target penerimaan retribusi daerah sebesar 6.776.772.693,00 dan realisasinya sebesar 6,777,314,436.00 mengalami kelebihan sebesar 541.743,00. persentasenya sebesar 0.01% presentase efektivitas menunjukkan 100%, Hal ini menunjukkan bawah tingkat efektivitas menunjukkan sangat efektif dan efektif.

#### 4.2.4. Perhitungan Efektivitas Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Efektivitas didapat dari Realisasi Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dibagi Target Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dikali 100% , hasil bagi di tahun 2010 sama dengan 99.05%, bahwa sangat efektif artinya sesuai dengan klasifikasi kriteria nilai Efektivitas yang ditetapkan oleh Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006. Apabila Realisasi Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dibagi Target Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan lebih kecil dari 100% maka kriteria Nilai Efektivitas menunjukkan Efektif, Perhatikan Perhitungan Efektivitas Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Kulon Progo tahun 2010 sampai dengan 2014, nampak pada Tabel 4.6 berikut :

**Tabel 4.6**  
**Perhitungan Efektivitas Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Kulon Progo tahun 2010 s/d 2014.**

TAHUN	Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Rupiah)		LEBIH/KURANG		EFEKTIVITAS (%)	keterangan
	TARGET	REALISASI	(Rupiah)	PERSENTASE (%)		
2010	4.785.876.909,61	4,740,517,850.30	(45.359.059.31)	-0.95%	99.05%	efektif
2011	4.936.479.031,53	4,936,479,032.53	1	0.00%	100.00%	sangat efektif
2012	6.770.687.918,62	6,765,040,924.72	(5.646.993.90)	-0.08%	99.91%	efektif
2013	8.267.601.424,42	8,252,584,228.16	(15.017.196.26)	-0.18%	99.81%	efektif
2014	10.255.839.797,41	10,176,928,233.90	(78.911.563.51)	-0.77%	99.23%	efektif

*Sumber data : DPPKA kabupaten Kulon Progo (data diolah) diambil tahun 2015*

Dari tabel 4.6 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami hasil yang efektif, ini terbukti dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, target penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan realisasi penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selisih antara target dan realisasi sangat pada tahun 2010 target sebesar 4.785.876.909,61 dan realisasi sebesar 4,740,517,850.30 mengalami sedikit kekurangan sebesar (45.359.059.31) persentasenya sebesar -0.95%, dengan tingkat efektivitas sebesar 99.05%, tahun 2011 realisasi penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 4,936,479,032.53 dan targetnya sebesar 4.936.479.031,53, kurang sebesar 1.00 sekian, sangat kecil. Persentasenya sebesar 0.00% dengan tingkat efektivitas sebesar 100.00%. dan pada tahun 2012 target sebesar 6.770.687.918,62 dan realisasi sebesar 6,765,040,924.72 mengalami sedikit kekurangan sebesar (5.646.993.90) persentasenya sebesar -0.08%, dengan tingkat efektivitas sebesar 99.91%, pada tahun 2013 realisasi sebesar 8,252,584,228.16 dan target 8.267.601.424,42 dengan mengalami kekurangan sebesar (15.017.196.26) dengan persentase sebesar -0.18% dengan efektivitas sebesar 99.81%, dan pada tahun 2014 Realisasi sebesar 10,176,928,233.90 dan target sebesar 10.255.839.797,41 dengan kekurangan sebesar (78.911.563.51) dengan persentase sebesar -0.77% dengan tingkat efektivitas sebesar 99.23%. pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan termasuk efektif.



**Tabel 4.7**  
**Perhitungan Target dan Realisasi PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Realisasi PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terhadap Efektivitas (%).**

	URAIAN	TARGET	REALISASI	Efektivitas %
10	PAD	48.190.801.571,16	48.190.801.571,16	100,00%
	PAJAK DAERAH	3.028.000.798,93	3.853.808.091,75	127,21%
	RETRIBUSI DAERAH	7.590.100.710,00	7.727.507.308,00	101,80%
	MANEJEMEN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	6.782.576.909,81	6.746.517.222,00	99,62%
11	PAD	50.913.600.001,00	50.762.291.031,00	100,07%
	PAJAK DAERAH	3.028.000.798,93	3.853.808.091,75	127,21%
	RETRIBUSI DAERAH	7.590.100.000,00	8.450.598.799,00	111,33%
	MANEJEMEN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	6.992.479.001,00	6.958.474.222,00	100,00%
12	PAD	66.998.219.032,18	76.028.660.155,07	113,59%
	PAJAK DAERAH	7.420.115.981,00	8.448.289.543,50	113,85%
	RETRIBUSI DAERAH	11.021.810.810,00	11.658.574.399,00	105,99%
	MANEJEMEN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	6.770.687.018,82	6.768.040.972,00	99,97%
13	PAD	78.430.700.308,93	85.991.512.851,06	110,29%
	PAJAK DAERAH	7.682.177.800,00	8.701.788.661,88	113,26%
	RETRIBUSI DAERAH	18.778.870.174,00	19.688.208.678,75	104,80%
	MANEJEMEN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	8.287.601.034,93	8.359.514.728,18	99,91%
14	PAD	121.892.992.126,78	158.800.563.703,19	130,20%
	PAJAK DAERAH	10.447.388.981,00	12.174.678.768,00	116,55%
	RETRIBUSI DAERAH	8.776.774.692,00	8.777.814.428,00	100,00%
	MANEJEMEN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	10.255.829.797,61	10.178.978.728,00	99,24%

Sumber data : DPPKA kabupaten Kulon Progo (data diolah) diambil tahun 2015

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan rata-rata di setiap tahun mengalami peningkatan, yang tertinggi pada tahun 2013 PAD Kabupaten Kulon Progo sebesar 122,39%. Menurut Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006, apabila presentase lebih dari 100% maka Realisasi PAD dikatakan sangat efektif terhadap Kabupaten Kulon Progo, Perhitungan Kontribusi PAD Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

#### 4.3. Perhitungan Kontribusi Pajak Daerah tahun 2010 s/d 2014

Dari hasil perhitungan diatas maka 8.94% mempunyai arti bahwa kontribusi Sangat Kurang sesuai dengan Klasifikasi Kriteria Kontribusi menurut Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006.

**Tabel 4.9.**  
**Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo 2010-2014**

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Realisasi	Tk. Kontribusi	Keterangan
		Penerimaan Pajak Daerah		
2010	48,190,801,571.16	4,310,294,480.42	8.94%	sangat kurang
2011	53,752,293,431.63	5,853,809,091.25	10.89%	kurang
2012	74,028,663,155.07	8,448,289,543.50	11.41%	kurang
2013	95,991,512,851.06	8,696,477,331.88	9.05%	sangat kurang
2014	158,800,563,703.19	21,171,477,417.00	13.33%	kurang

Sumber data : DPPKA kabupaten Kulon Progo (data diolah) diambil tahun 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan PAD tahun 2010 sampai tahun 2014 selalu mengalami peningkatan. Sama pula mulai pada realisasi penerimaan pajak daerah mulai tahun 2010 sampai 2014, meskipun pada tahun 2012 dan 2013 realisasi penerimaan pajak daerah hanya mengalami sedikit peningkatan. Tetapi bila dilihat dari persentasinya cenderung Fluktuatif. Pada tahun 2010 kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 8,94% sangat kurang. pada tahun 2011 meningkat sebesar 10.89%, dibandingkan 2011, pada tahun 2012 lebih meningkat menjadi 11,41%. Tetapi ada penurunan pada tahun 2013 sebesar 9,05%, namun tidak berjalan lama pula karena pada tahun 2014

meningkat sampai 13,33%. Presentase ini memperlihatkan bahwa sumbangan pajak daerah tidak besar terhadap pendapatan asli daerah. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan presentasi kontribusi pajak daerah terhadap PAD mengalami Fluktuatif. Sehingga pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus menggali potensi-potensi yang ada dengan usaha meningkatkan dan mengembangkan kemandirian daerahnya.

#### 4.4. Perhitungan Kontribusi Retribusi Daerah tahun 2010 s/d 2014.

Dari hasil perhitungan diatas maka 16.03% mempunyai arti bahwa kontribusi Kurang sesuai dengan Klasifikasi Kriteria Kontribusi menurut Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 2006 bahwa kontribusi 10% - 20% kontribusi dinyatakan Kurang terhadap PAD kabupaten Kulon Progo. Perhatikan Perhitungan Kontribusi Retribusi daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2010 s/d 2014 nampak pada Tabel 4.10 berikut:

**Tabel 4.10**  
**Kontribusi Retribusi Daerah**  
**Kabupaten Kulon Progo 2010-2014**

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	Tk. Kontribusi	Keterangan
2011	53.752.293.431,63	8.450.599.293,00	15.72%	kurang
2012	74.028.663.155,07	11.655.374.999,00	15.74%	kurang
2013	95.991.512.851,06	14.986.509.628,75	15.61%	kurang
2014	158.800.563.703,19	6.777.314.436,00	4.26%	sangat kurang
2010	48.190.801.571,16	7.727.507.308,00	16.03%	kurang

Sumber data : DPPKA kabupaten Kulon Progo (data diolah) diambil tahun 2015

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Realisasi penerimaan PAD dari tahun 2010 sampai dengan 2014 terus mengalami peningkatan, sedangkan Realisasi penerimaan retribusi daerah dari tahun 2010 sampai 2013 mengalami peningkatan namun tahun 2014 Penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan sebesar 6.777.314.436,00, pada tahun 2010 sampai tahun 2013 terus mengalami peningkatan mulai dari tahun 2010 sebesar 7.727.507.308,00 sedangkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 14.986.509.628,75. Tetapi bila dilihat dari presentasi kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah mulai tahun 2010 sebesar 16.03%, pada tahun 2011 sebesar 15.72%, tahun 2012 sebesar 15.74%. dan di tahun 2013 sebesar 15.61% tetapi di tahun 2014 menurun yaitu sebesar 4.26%. Secara keseluruhan presentasi ini memperlihatkan bahwa sumbangan retribusi tidak terlalu besar terhadap PAD rata-rata sumbangan mulai tahun 2010 sampai 2013 sama namun pada tahun 2014 peningkatan presentasi menurun sangat besar sebesar 4.26%. dengan begitu, pemerintah kabupaten kulon progo harus meningkatkan retribusi daerah agar kemandirian daerah dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan dan rancangan kesejahteraan bersama.

#### 4.5. Perhitungan Kontribusi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2010 s/d 2014.

Kurang sesuai dengan Klasifikasi Kriteria Kontribusi menurut Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 bahwa kontribusi Dari hasil perhitungan diatas maka 9.83% mempunyai arti bahwa kontribusi sangat 1% - 10% kontribusi dinyatakan sangat Kurang terhadap PAD kabupaten Kulon Progo.

**Tabel 4.11**  
**Kontribusi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**  
**Kabupaten Kulon Progo 2010-2014**

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Realisasi Penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Tk. Kontribusi	keterangan
2010	48.190.801.571,16	4,740,517,850.30	9.83%	sangat kurang
2011	53.752.293.431,63	4,936,479,032.53	9.18%	sangat kurang
2012	74.028.663.155,07	6,765,040,924.72	9.13%	sangat kurang
2013	95.991.512.851,06	8,252,584,228.16	8.60%	sangat kurang
2014	158.800.563.703,19	10,176,928,233.90	6.40%	sangat kurang

Sumber data : DPPKA kabupaten Kulon Progo (data diolah) diambil tahun 2015

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa realisasi penerimaan PAD dari tahun 2010 sampai tahun 2014 terus mengalami peningkatan sedangkan realisasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari tahun 2010 sebesar 4.740.517.850.30, mengalami sedikit peningkatan di tahun 2011 sebesar 4.936.479.032.53, di tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 6.765.040.924.72 dan di tahun 2013 mengalami peningkatan yang baik sebesar 8.252.584.228.16, sampai tahun 2014 mengalami peningkatan besar sebesar 10.176.928.233.90.

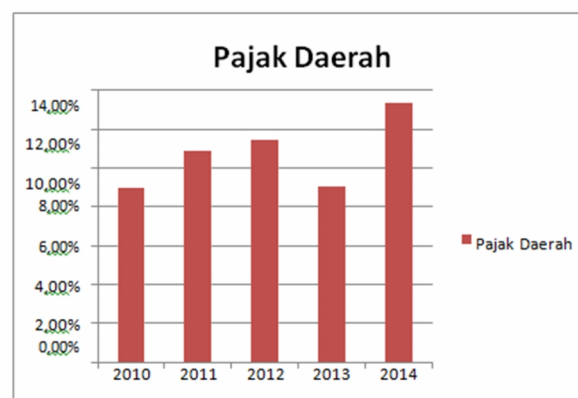
Secara keseluruhan presentase realisasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD cukup besar meski cenderung mengalami fluktuatif di setiap tahun, sehingga dalam hal ini pemerintah kabupaten kulon progo harus lebih baik lagi dalam meningkatkan penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan agar dapat meningkatkan PAD secara baik demi terwujudnya kemandirian daerah. Namun pada kenyataannya presentase kontribusi setiap tahunnya sangat kurang, pada tahun 2010, presentase kontribusi sebesar 9.83%, hal yang sama di tahun 2011 sebesar 9.18% ini mengalami sedikit penurunan, kemudian pada tahun 2012 presentasi sebesar 9.13%, mengalami sedikit kenaikan, namun di tahun 2013 menurun sebesar 8.60%. lebih parahnya di tahun 2014 sangat menurun presentase kontribusi sebesar 6.40%. ini berarti bahwa kontribusi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sangat kurang dibandingkan dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

#### 4.6. Analisis Kontribusi menggunakan grafik

Persoalan pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembahasan pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD dapat disajikan penjabarannya sebagai berikut:

##### 4.6.1. Pajak Daerah

**Gambar 4.1**  
**Grafik Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD tahun 2010 s/d 2014**

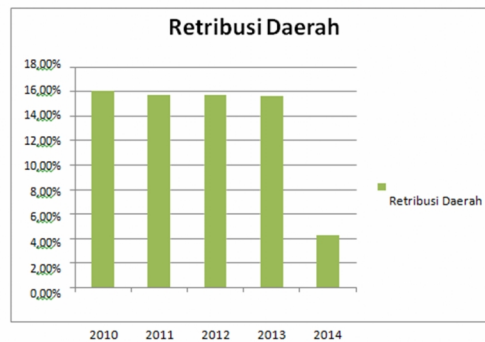


Sumber : data LRAPBD, diolah dengan microsoft excel 2007

Diketahui bahwa kontribusi pajak daerah mengalami peningkatan yang fluktuatif terbukti pada tahun 2010 sebesar 8.94% terhadap PAD, di tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 10.89%, tahun 2012 mengalami peningkatan lagi sebesar 11.41% namun pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 9.05%, pada tahun 2014 penerimaan pajak daerah di kabupaten Kulon progo mengalami peningkatan sampai 13.33% di tahun 2014.

#### 4.6.2. Retribusi Daerah

**Gambar 4.2.**  
**Grafik Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD tahun 2010 s/d 2014.**

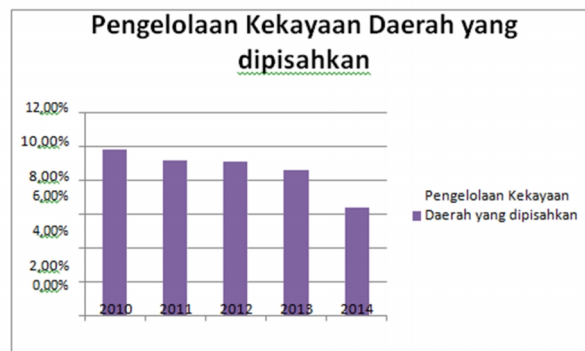


*Sumber data : data LRAPBD, diolah dengan microsoft excel 2007*

Dari grafik 4.2 diatas penerimaan PAD dari retribusi daerah dapat menggambarkan bahwa kontribusi mengalami Fluktuatif. Pada tahun 2010 sebesar 16.03%, tahun 2011 penurunan sebesar 15.72% sementara tahun 2012 mengalami sedikit peningkatan sebesar 15.74% sampai tahun 2013 kontribusi menurun sebesar kurang lebih 15.61%, tahun 2014 penurunan sangat besar mendekati 4.26% kontribusinya.

#### 4.6.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

**Grafik 4.3**  
**Grafik kontribusi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2010 s/d 2014.**

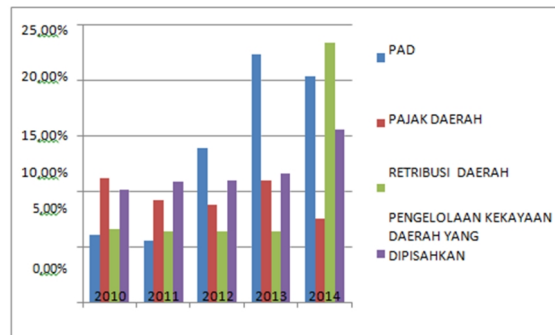


*Sumber data : data LRAPBD, diolah dengan microsoft excel 2007*

Penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selalu mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai tahun 2014, peningkatan ini mulai dari tahun 2010 sebesar 9.83% sampai tahun 2014 sebesar 16.40%.

#### 4.7. Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah,Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

**Gambar 4.5.**  
**Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah,Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**



Sumber : data LRAPBD, data diolah oleh microsoft excel 2007

Dari diagram diatas dapat dijelaskan bahwa PAD, pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami fluktuasi yaitu mengalami keadaan naik turun tiap tahun pada variabel yang berbeda

#### 5. SIMPULAN

- Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penerimaan PAD dari tahun 2010 sampai dengan 2014 mengalami peningkatan ini berarti bahwa tingkat efektivitas menunjukkan PAD sangat efektif, Dapat dilihat dari tahun 2010 tingkat efektivitas mencapai 105,90%, tahun 2011 efektivitas mencapai 105,57% ini mengalami penurunan sebesar 0,33% dari tahun 2010, di tahun 2012 tingkat efektivitas PAD mencapai 113,89% mengalami peningkatan sebesar 8,32%, selanjutnya pada tahun 2013 tingkat efektivitas sebesar 122,39% mengalami peningkatan pula sebesar 8,5% dan tahun 2014 tingkat efektivitas sebesar 120,40 ini menandakan bahwa di tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 1,98%.sesuai dengan Klasifikasi Kriteria Efektivitas menurut Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006, rata-rata PAD setiap tahun sangat efektif.
- Efektivitas Pajak Daerah, terhadap PAD Kabupaten Kulon Progo dari Tahun 2010 sampai dengan 2014, mengalami peningkatan yang cukup baik dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 ini berarti bahwa Efektivitas Pajak Daerah efektif terhadap PAD di tahun 2011, pajak daerah sebesar 116,88% mengalami peningkatan namun di tahun 2012 presentase pajak daerah terhadap PAD mengalami penurunan sebesar 113,85% dan di tahun 2013 pajak daerah sebesar 113,99% ini mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2012, namun tahun 2014 efektivitas menunjukkan presentase sebesar 103,55% terhadap PAD Kabupaten Kulon Progo.Efektivitas Retribusi Daerah, terhadap PAD Kabupaten Kulon Progo mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Efektif. Terbukti dari tahun 2010 presentase sebesar 108,80%, tahun 2011 sebesar 92,52%, tahun 2012 sebesar 96,95%, dan pada tahun 2013 sebesar 108,80% namun pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 100%, dapat dilihat bahwa Retribusi Daerah Efektif terhadap PAD. Efektivitas Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap PAD, mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2014 efektif, sedangkan pengertian efektifitas menurut Schemerhon John R. Jr. (1986:35) adalah sebagai berikut :“ Efektifitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika  $(OA) > (OS)$  disebut efektif ”. jika output actual berbanding output yang ditargetkan lebih besar atau sama dengan satu (1), maka akan tercapai efektivitas.
- Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sangat kurang terhadap PAD Kabupaten Kulon Progo ini terbukti mulai tahun 2010 kontribusi sebesar 8,94% terhadap PAD, tahun 2011 sebesar 10,89%, tahun 2012 sebesar 11,41% namun mengalami penurunan sebesar 9,05% namun pada tahun 2014 presentase sebesar 13,33%, ini menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Daerah Kurang terhadap PAD, berikutnya Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD,pada tahun 2010 sebesar

16,03%, tahun 2011 sebesar 15,72%, di tahun 2013 presentase sebesar 15,74% dan pada tahun 2014. Presentase sebesar mengalami penurunan sebesar 4,26%. Kontribusi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap PAD mulai dari tahun 2010 sebesar 9,83%, 2011 sebesar 9,18%, tahun 2012 sebesar 9,13%, dan pada tahun 2013 presentase sebesar 8,60% mengalami penurunan sebesar 6,40%, kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sangat kurang terhadap PAD Kabupaten Kulon Progo

- d) Dari 3 (tiga) komponen tersebut dapat disimpulkan bahwa yang memiliki tingkat efektivitas yang sangat efektif pada PAD tahun 2013, dan Kontribusi terbesar pada PAD adalah Retribusi Daerah tahun 2010, meskipun mempunyai kontribusi terbesar namun dapat dikatakan bahwa Retribusi Daerah masih kurang memberikan Kontribusi pada PAD Kabupaten Kulon Progo.

## 6. REFERENSI

- [1] Adellia Shabrina Prameka, tentang Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Ahmad Yani (2009:51) Ananda (2001) Abdul Halim (2004:68) Akbar (2012) Bastian (2006:189)
- [2] Biro Pusat Statistik Kota Yogyakarta, kabupaten Kulon Progo dalam Angka. Dini. 2012. "Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010 2011 (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman)".
- [3] Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan asset Daerah (DPPKA) Kabupaten Kulon Progo
- [4] Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006
- [5] Henny Purniasih (2010) meneliti tentang analisis efektivitas dan kontribusi pajak pengembalian bahan galian golongan C terhadap pendapatan asli daerah kabupaten sleman. (Harianto dan Priyo 2010), Halim (2006) dalam indraningrum (2011) (Halim 2004:18) dalam Mauliana (2009)
- [6] Keputusan menteri dalam negeri no 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan dan pertanggung jawaban keuangan daerah serta tata cara pengawasan, penyusunan dan perhitungan APBD
- [7] Muchammad Zaky (2012), tentang peranan pajak daerah dan kontribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten ekskaresidenan Banyumas Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Penerbit. Andi: Yogyakarta.
- [8] Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- [9] Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
- [10] Peraturan Daerah kabupaten Kulon Progo No 6 tahun 2011 tentang pajak Daerah pemendagri nomor 13 tahun 2006,
- [11] Rosa Alamri meneliti tentang "Pengaruh pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap belanja daerah (studi kasus kabupaten/kota di propinsi gorontalo)",
- [12] Safitri, Dian. 2010. "Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah Dalam Upaya Peningkatan PAD", Yogyakarta. Siahaan (2005) dalam Rahdina (2008)
- [13] Undang-undang No 32 tahun 2004
- [14] Undang - undang no 33 tahun 2004
- [15] Undang-undang Nomor 34 Tahun. 2004. Tentang Jenis Pajak Daerah.
- [16] Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak hotel dan retribusi daerah.
- [17] Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah, retribusi daerah, pajak daerah
- [18] Undang-undang Nomor 17 pasal 2 tahun 2003 meliputi kekayaan negara / daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang,
- [19] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- [20] Yakobus Doru (2010), penelitiannya tentang analisis kontribusi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain pendapatan asli daerah kabupaten Bantul